

STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PENDIDIKAN

Sandy

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: The purpose of this research is to focus on the supervision strategy and responsibility of the Regional Government in the development of the education sector in sub district Rangsang Pesisir after the expansion in 2012 and what are the supporting factors and obstacles to the process. The approach of this research is to use a qualitative descriptive method that is describing and explaining the problems studied in the form of sentences not in the form of numbers. This research was conducted at the Education Office of Kepulauan Meranti Regency. Data analysis is done by organizing data, describing it into units, synthesizing, arranging into patterns, choosing which ones are important to learn, and by making conclusions that can be told to others. Based on the result of the research there are 5 core Education Sector Development Strategies in Kepulauan Meranti District (Case Study of Post-Expansion Rangsang Pesisir Districts in 2013-2017) which are five C (core, consequences, customer, control, and culture). The most important government of the Regency of Meranti District Service has a strategy in achieving organizational goals, implementation has been carried out and still requires evaluation and reduces obstacles in implementing this strategy. There are factors that influence the Education Sector Development Strategy in Kepulauan Meranti District namely budget, human resources and people's mindset.

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk fokus pada strategi pengawasan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengembangan sektor pendidikan di Kecamatan Rangsang Pesisir setelah ekspansi pada tahun 2012 dan apa saja faktor pendukung dan penghambat proses tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan masalah yang diteliti dalam bentuk kalimat bukan dalam bentuk angka. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti. Analisis data dilakukan dengan mengorganisir data, menggambarkannya ke dalam unit, mensintesis, mengatur ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan dengan membuat kesimpulan yang dapat disampaikan kepada orang lain. Berdasarkan hasil penelitian terdapat 5 inti Strategi Pengembangan Sektor Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Kabupaten Rangsang Pesisir Pasca Ekspansi pada 2013-2017) yaitu lima C (inti, konsekuensi, pelanggan, kontrol, dan budaya). Pemerintah terpenting dari Dinas Kabupaten Meranti memiliki strategi dalam mencapai tujuan organisasi, implementasi telah dilakukan dan masih memerlukan evaluasi dan mengurangi hambatan dalam menerapkan strategi ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Strategi Pengembangan Sektor Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu anggaran, sumber daya manusia dan pola pikir masyarakat.

Kata Kunci: pemerintah daerah, strategi pengembangan, pendidikan

PENDAHULUAN

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Dibentuk pada tanggal 19 September 2008, dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti ini diharapkan dapat memajukan kehidupan masyarakat diantaranya pembangunan pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat dari angka putus sekolah SD/MI pada perbandi-

ngan wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Riau angka putus sekolah di Kabupaten Kepulauan Meranti masih sangat tinggi yaitu sebesar 1.87 persen. Dari data tahun 2013 di Kabupaten Kepulauan Meranti masih banyak anak usia sekolah 7 sampai 12 tahun yang duduk di bangku sekolah dasar maupun sederajat tidak dapat menyelesaikan sekolah hingga kelas VI.

Kondisi tersebut semakin diperkuat dengan angka partisipasi kasar (APK) untuk SD/MI dimana upaya peningkatan APK bagi sekolah dasar dan sederajatnya di Kabupaten Kepulauan Meranti masih jauh dari penargetan yang dilakukan oleh provinsi maupun nasional.

Hal ini sejalan dengan keadaan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI upaya peningkatan partisipasi anak usia sekolah 7 sampai 12 tahun agar mau dan menyelesaikan sekolah dasar dan sederajatnya masih jauh dari penargetan provinsi maupun nasional.

Sejak berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti, pembangunan pendidikan masih belum merata, terutama di Kecamatan Rangsang Pesisir. Rangsang Pesisir adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Ibukota kecamatan adalah Sonde. Kecamatan Rangsang Pesisir merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kecamatan Rangsang Barat pada tahun 2012.

Berdasarkan data, terlihat usia sekolah menunjukkan jumlah angka yang cukup tinggi, ada sekitar 5304 jiwa yang seharusnya mengenyam dunia pendidikan. Namun tidak semua bisa menimba ilmu di dunia pendidikan. Kemudian selama pemekaran Kecamatan Rangsang Pesisir pembangunan prasarana pendidikan belum merata secara signifikan sementara jumlah murid senantiasa mengalami penurunan disetiap tahunnya. Pada Sekolah Dasar terdapat sekitar 2.244 siswa yang sekolah. Kemudian terjadi penurunan yang drastis pada Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dalam hal ini seharusnya Pemerintah memiliki kewajiban meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memfasilitasi dan menunjang segala kebutuhan terutama di sektor pendidikan.

Masyarakat di Kecamatan Rangsang Pesisir sangat membutuhkan prasarana pendidikan khususnya sekolah dasar (SD) dan Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Sejauh ini hanya ada 3 sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) di Kecamatan Rangsang Pesisir, yakni di desa Tajung Kedabu, Sonde dan Kedabu Rapat. Dari data diatas dapat kita lihat murid sekolah dasar yang mencapai 2.244 hanya sekitar 661 murid yang melanjutkan sekolah ke tingkat pertama (SLTP).

Pada tahun 2015 di Kecamatan Rangsang Barat terdapat 12 Taman Kanak-kanak, 18 Sekolah Dasar, 3 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan 2 Sekolah Menengah Umum. Se-

dangkan untuk madrasah Kecamatan Rangsang Barat memiliki 2 Madrasah Ibtidaiyah, 5 Madrasah Tsanawiyah, 1 Madrasah Aliyah dan 19 Madrasah Diniyah Awaliyah. Dilihat dari observasi awal tampak perbandingan yang sangat jauh antara Kecamatan Rangsang Pesisir dan Kecamatan Rangsang Barat hal ini menjadi menarik untuk ditelusuri lebih lanjut dalam hal pembangunan pendidikan.

Selain itu di Kecamatan Rangsang Pesisir yakni tepatnya di desa Sokop masih banyak masyarakat suku akit yang hidup di hutan-hutan pedalaman. Dimana anak-anak masyarakat suku akit ini harus menempuh perjalanan sekitar 10 KM untuk bisa sampai ke sekolah.

Implikasi Desentralisasi Pemerintahan bagi Pembangunan Pendidikan Kabupaten/ Kota Tiga persoalan mendasar yang patut diantisipasi dalam desentralisasi manajemen pendidikan, yaitu apakah pemberian otonomi kepada daerah akan menjamin setiap warga Negara memperoleh haknya dalam pendidikan? Apakah pemberian kewenangan menyelenggarakan pendidikan kepada daerah dapat menjamin peran serta masyarakat akan meningkat? Apakah penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan daerah dapat mencapai hasil-hasil pendidikan yang bermutu? Dasar pijak untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut adalah UU No 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

UU tersebut telah membawa implikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional. Implikasi tersebut diantaranya bahwa setiap proses manajemen penyelenggaraan pendidikan nasional harus berlandaskan pula pada paradigma *bottom up approach*, karena di samping organisasi dan manajemen pendidikan nasional harus acceptable bagi masyarakatnya, juga harus accountable dalam melayani public terhadap kebutuhan pendidikan. Secara teknis operasional, manajemen pendidikan tingkat atas eksistensinya tergantung rekomendasi kebutuhan pada tingkat bawahnya secara berjenjang, dalam arti substansi, proses, dan konteks sama, baik dengan daerah lainnya yang sederajat maupun dengan provinsi, Secara teoretis keragaman tersebut akan memunculkan

sinergitas yang didukung oleh keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan

Untuk kecamatan yang baru mekar sudah tentu memerlukan pembangunan yang signifikan terutama dibidang pendidikan. Dari data statistik di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tahun 2012-2016 tidak ada perubahan yang signifikan terhadap pembangunan prasarana pendidikan dan semakin berkurangnya siswa yang mendaftar masuk sekolah tiap tahunnya. Dalam hal ini seharusnya Pemerintah memiliki kewajiban meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memfasilitasi dan menunjang segala kebutuhan terutama di sektor pendidikan. Pemerataan pendidikan merupakan salah satu masalah yang ditanggapi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti cukup serius. Hal ini dibuktikan dengan beberapa rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk pembangunan pendidikannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembangunan sektor pendidikan di Kecamatan Rangsang Pesisir pasca pemekaran Tahun 2012.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti. Alasan peneliti memilih lokasi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah dikarenakan peneliti menemukan fenomena-fenomena atau permasalahan penelitian ditemukan pada lokasi ini. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, orang yang dianggap paling tahu tentang permasalahan yang diteliti atau orang yang berkedudukan sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk memahami obyek serta situasi sosial yang diteliti.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting di-

pelajari, dan dengan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Tuntutan pemekaran kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kawedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari kabupaten Bengkalis.

Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :
Terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, memiliki ketrampilan, kecerdasan, intelektual, emosional serta budaya saing tinggi secara nasional maupun global.
- b. Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :
 - 1) Mengusahakan perluasan dan pemerintahan pelayanan pendidikan
 - 2) Menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
 - 3) Mengupayakan kepentingan mutu pendidikan
 - 4) Meningkatkan kemampuan pengendalian diri peserta didik berdasarkan logika, etika dan estetika dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan
 - 5) Meningkatkan pendidikan agama, akhlak, budi pekerti dan kewarganegaraan
 - 6) Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Strategi Pembangunan Sektor Pendidikan

Terdapat 5 core Strategi Pembangunan Sektor Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Kecamatan Rangsang Pesisir Pasca Pemekaran pada tahun 2013-2017) yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi inti (*core strategy*)

Dalam *strategy* inti, Kabupaten Meranti adalah kabupaten yang bisa menentukan tujuan dan fungsinya sendiri karena telah menjadi daerah yang otonom. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pentingnya untuk merumuskan tujuan, tanggung jawab, dan fungsi pemerintah daerah dalam tujuan pembangunan sektor pendidikan. Terdapat upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meninjau apakah tujuan, tanggung jawab, dan fungsi yang dirumuskan telah sesuai dengan kebutuhan pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Meranti ini.

2. *Conseques strategy* (strategi konsekuensi)

Pegawai dan hasil kinerjanya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah karena hasil kinerja inilah yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dan fungsi yang telah ditetapkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan strategi ini dengan berbagai cara, pertama, bentuk apresiasi terhadap kerja pegawai itu sendiri; kedua, bentuk motivasi atau semangat bagi pegawai lainnya untuk bekerja lebih baik; dan ketiga, tercapainya tujuan utama pemerintah daerah untuk membangun sektor pendidikan.

3. *Customer strategy* (strategi pelanggan)

Pemerintah Kabupaten Meranti menyadari tanggung jawabnya sebagai pihak yang menjalankan pembangun sektor pendidikan di kabupaten tersebut. Adapun hal yang ditemui pada strategi ini adalah sulitnya pendanaan dan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saat ini Pemerintah Kabupaten Meranti hanya berupaya untuk mendorong pembangunan sektor sebisa mungkin dengan segala keterbatasan yang ada, serta pemerintah mengharapkan masyarakat

masih mau menunggu dan bersabar menunggu hasil yang signifikan dari pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Meranti.

4. *Control strategy* (strategi pengawasan)

Pemerintah daerah dalam hal ini mengambil keputusan untuk bagaimana mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan sektor pendidikan agar tidak terjadi kesalahan dan kerugian. Dinas Pendidikan Kabupaten Meranti tersebut menyiratkan bahwa dalam serangkaian tanggung jawab, tugas, wewenang, dan fungsinya sebagai anggota pemerintah daerah, maka Pemerintah Kabupaten Meranti berusaha pula untuk mengawasi jalannya pembangunan sektor pendidikan di kabupaten tersebut. Hal ini ditunjukkan melalui pengawasan terhadap sumber daya manusia, pengawasan pendanaan, data-data audit, dan hal lainnya yang berkaitan langsung khususnya dengan pembangunan sektor pendidikan di kabupaten Meranti agar tercapainya tujuan untuk meningkatkan pembangunan sektor pendidikan di kabupaten tersebut.

5. *Culture strategy* (strategi budaya)

Pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Meranti belum mencapai pada titik yang maksimal. Namun meskipun demikian bukan berarti aspek-aspek yang menunjang optimalisasi dari kinerja para staf atau pegawai dilupakan begitu saja. Salah satunya adalah budaya yang penting untuk diperhatikan, karena budaya dan kebiasaan meliputi nilai-nilai, norma, sikap, harapan pegawai, dan tanggung jawab yang berimbas pada kinerja yang ditunjukkan oleh staf maupun pegawai pemerintahan Dinas Pendidikan Kabupaten Meranti.

Faktor yang Mempengaruhi Strategi Pembangunan Sektor Pendidikan

Terdapat faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

1. Anggaran

Anggaran menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan pendidikan di Kecamatan Rangsang Pesisir. Selain itu didalam hal sistem pembiayaan pendidikan yang tidak mampu dibayarkan oleh orang tua murid.

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa walaupun Kecamatan Rangsang Pesisir sudah memiliki dana alokasi dari pusat, namun mendapatkan anggaran dan langsung direalisasikan tidaklah mudah, memerlukan tahapan yang panjang.

2. Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki baik di kabupaten maupun di Kecamatan Rangsang sudah memadai, dan evaluasi terus dilaksanakan. Pengembangan sumber daya manusia sebagai upaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya pada penduduk untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Pada hakekatnya sumber daya manusia tidak hanya penting diperhatikan masalah keahlian sebagai mana yang telah umum dipahami dan diterima, tetapi juga penting diperhatikan masalah etika atau akhlak dan keimanan-keimanan pribadi-pribadi yang bersangkutan

3. Pola pikir masyarakat

Pola pikir masyarakat Kecamatan Rangsang Pesisir masih belum dominan terhadap pendidikan. Hal ini dikarenakan mereka lebih mengutamakan pekerjaan harian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka terlebih dahulu. Terkait dengan perubahan nilai sosial, kecenderungan yang ada di masyarakat kita saat ini adalah penghargaan berlebih terhadap pendidikan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat. Pada zaman dulu, manusia dinilai dari kepemilikan tanah, keturunan atau kekayaan yang dia miliki. Sementara saat ini, manusia ditempatkan dalam kotak-kotak ijazah, dimana dia dilihat sebagai siswa sekolah A atau mahasiswa universitas B, bukan dia sebagai seseorang dengan kualitas personalnya yang utuh. Pendidikan seolah-olah menjadi tangga untuk menuju status sosial yang lebih tinggi.

SIMPULAN

Terdapat lima core strategi Pembangunan Sektor Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu lima C (*core, consequences, customer, control, dan culture*). Pemerintah terutama Dinas Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki strategi dalam men-

capai tujuan organisasi, pelaksanaan telah dilaksanakan dan masih membutuhkan evaluasi dan mengurangi hambatan dalam pelaksanaan strategi ini. Terdapat faktor yang mempengaruhi Strategi Pembangunan Sektor Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu anggaran, SDM dan pola pikir masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- A.R. Mustopadidjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Budi Winarno. 2005. *Teoridan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Consuelo G. Sevilla dkk. 2000. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Husein Umar. *Strategik Management in Action*. 2001. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Miriam Budiarjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahardjo Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Graha Ilmu
- Ratnawati T. 2009. *Pemekaran Daerah: Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saile Said. 2009. *Pemekaran Wilayah sebagai Buah Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Restu Agung.
- Syaiful Sagala. 2013. *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Djam'an Satori. dkk. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Hetifah Sj. Sumarto. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wayne Parsons. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- William N Dunn. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

- Sirojuzilam, 2008. *Ekonomi dan Perencanaan Regional*, Medan: Pustaka Bangsa.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju
- Sudiyono. 1992. *Model Penelitian Evaluasi (Evaluasi Dampak Program)*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol UGM.
- Tangkilisan, 2004. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Lukman Offset.
- Thomas R. Dye, 1978. *Understanding Public Policy*, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, NJ
- William, N, Dunn. 1994. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada university Press.